

Judul : APBN-P 2016 Diubah, DPR Tak Satu Suara
Tanggal : Jumat, 05 Agustus 2016
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 6

APBN-P 2016 Diubah, DPR Tak Satu Suara

JAKARTA-Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 melahirkan pro kontra di DPR. Ada yang menilai pemerintah main-main dalam menyusun anggaran, ada juga yang mengapresiasi keputusan tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan mengatakan, keputusan merevisi Undang-Undang APBNP mengindikasikan bahwa pemerintah tak percaya diri dengan anggaran yang mereka susun. Menurutnya, pemerintah juga tak memiliki dasar untuk mengubah undang-undang yang berusia belum genap dua bulan itu.

"Dasarnya apa? Asumsi makro kan sudah disetujui, sudah dijadikan undang-undang sebelum DPR reses. Kalau pemerintah menyatakan seperti itu, berarti ada ketidakpercayaan pemerintah terhadap pendapa-

tan," tegas Heri saat dihubungi, Kamis (4/8).

Diketahui, Menkeu Sri Mulyani melakukan evaluasi APBNP 2016. Ia memangkas belanja hingga Rp 133 triliun, terdiri dari belanja kementerian lembaga Rp 65 T dan transfer daerah Rp 68,8 T. Penghitungan itu didasarkan pada kemungkinan turunnya penerimaan negara dari sisi pajak sekitar Rp 219 triliun.

"Tahun 2014 saja, realisasi penerimaan pajak kira-kira Rp 100 triliun, di bawah yang ditargetkan di APBN perubahan. Jadi, kalau lihat angka realisasi APBN 2014 berdasarkan laporan keuangan pemerintah, penerimaan pajak itu Rp 100 triliun lebih kecil dari yang tadinya direncanakan," ujar Sri Mulyani kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/8).

Melanjutkan keterangannya, Heri menegaskan, pemerintah tak boleh main-main

dengan politik anggaran. Sebab, masyarakat, iklim usaha, dan dunia internasional membutuhkan kepastian, menginginkan APBN yang kredibel. "Yang buat (APBN) kan pemerintah. Kalau pemerintah yang buat, kemudian mereka juga yang merevisi, namanya main-main," sesal anggota Fraksi Partai Gerindra itu.

Karenanya, lanjut dia, Komisi XI DPR akan memanggil Menkeu setelah masa reses. Sebab, pemerintah harus meminta persetujuan DPR untuk melakukan perombakan terhadap APBNP. "Masalahnya hanya satu, Undang-Undang APBNP sudah diketok. Sudah direvisi, masa mau revisi lagi. Kalau mau ubah silahkan saja, (namanya) jadi APBN-PP, perubahan-perubahan," sindirnya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengapresiasi keputusan Menkeu Sri Mulyani.

Politisi PDIP ini menilai, perombakan atau pembahasan Undang-Undang APBNP bisa dilakukan berkali-kali, terlebih pemerintah memiliki argumentasi kuat terkait perombakan tersebut.

"Ini keputusan rasional. Sejak awal, saya sudah menyampaikan pada Menkeu sebelumnya, kondisi perekonomian kedepan tidak mudah, kita tidak bisa mengharap keajaiban. DPR siap melakukan pembahasan ulang," ujar Hendrawan saat dihubungi, kemarin.

Ia pun memastikan, DPR dan pemerintah tak melakukan pelanggaran undang-undang apapun jika kembali merombak APBNP. Saat ini, DPR menunggu surat resmi dari Presiden terkait rencana perombakan APBNP. "Kami berharap, surat itu dikirim secepatnya. Setelah reses, DPR dan pemerintah langsung melakukan pembahasan," tandasnya. (aen)